



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-79172244, Fax 021-79172242
www.kemendesaco.id

Nomor : 02 / DPPMD.1 / 01 / 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Hasil Pertemuan Exposure Capaian
Program AMPL Daerah

Jakarta, 11 Januari 2018

**Yth. Peserta Pertemuan Exposure Capaian
Program AMPL Daerah**

Dalam rangka percepatan akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan, sebagai pelaksana Program PAMSIMAS dengan melakukan identifikasi masalah dan kendala serta merumuskan strategi penangan masalah, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyelenggarakan "Pertemuan Exposure Capaian Program AMPL Daerah" yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 November 2017 di Jayakarta Hotel, Jakarta.

Hasil kegiatan ini kami tuangkan dalam "Rekomendasi Hasil Kesepakatan Pertemuan Exposure Capaian Program AMPL Tahun Anggaran 2017" (Terlampir)

Semoga rekomendasi ini menjadi acuan pemerintah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang menangani pembangunan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam percepatan akses universal.

Kami selaku pelaksana mengucapkan terimakasih atas kontribusi Bapak/Ibu Peserta pertemuan dalam merumuskan hasil kegiatan ini dan kesungguhan para peserta untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di Indonesia tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA,**



**Drs. H. MUKLIS, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196903281989081001**

Lampiran Surat

Nomor : 02/DPPMD.1/01/2018

Tanggal : 11 Januari 2017

REKOMENDASI HASIL KESEPAKAN PERTEMUAN EXPOSURE CAPAIAN PROGRAM AMPL TAHUN ANGGARAN 2017 Jakarta, 28 November 2017

Berdasar hasil pemaparan para narasumber, identifikasi masalah/kendala pelaksanaan program Pamsimas dari peserta daerah dan diskusi kelompok yang telah dilaksanakan dalam acara Exposure Capaian Program AMPL, berikut adalah poin-poin rekomendasi hasil kesepakatan bersama peserta pertemuan Exposure capaian Program AMPL Tahun 2017 dalam rangka percepatan akses universal air minum dan sanitasi Perdesaan, antara lain :

1. Diperlukan sinergi perencanaan dan pendanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL)
2. Semua OPD terkait memasukkan perencanaan Universal Akses AMKL sebagai perencanaan prioritas dalam dokumen perencanaan daerah 5 tahun
3. Provinsi melakukan monitoring terhadap integrasi RAD-AMKL ke dalam dokumen RPJMD dan RKP di Kabupaten lokasi Pamsimas
4. Perlu penguatan kelembagaan POKJA AMKL dalam mengawal percepatan akses universal Air Minum dan Sanitasi (AMS) dengan melakukan pertemuan berkala tingkat provinsi untuk semua OPD terkait
5. Penganggaran AMKL dalam APBD menjadi salah satu poin evaluasi APBD kabupaten/kota, oleh Provinsi.
6. Mengadvokasi pihak swasta, Perguruan Tinggi, dan Perbankan, untuk ikut terlibat lebih intens dalam pencapaian universal akses AMS
7. Provinsi melakukan Pemetaan masalah & Pemecahannya dalam rangka Percepatan akses universal AMS di Perdesaan
8. Melakukan pemetaan kolaborasi sumber pendanaan dan menyiapkan skema pembiayaan serta mendorong keterpaduan Program maupun kegiatan di kabupaten.
9. Advokasi Gubernur/ Bupati/ Walikota terkait Regulasi dalam mendukung Program dan Kegiatan Percepatan akses universal AMS di Perdesaan
10. Mendorong Pemerintah Provinsi memberikan Reward bagi kabupaten yang dapat mencapai Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
11. Pemeriksaan Kualitas Air (PKA) Dalam Program Pamsimas (Dukungan SDM & Pendanaannya), dilakukan dengan:
 - a. Pengadaan Sarana Prasarana (Reagen) Sanitarian Kit
 - b. Monitoring PKA per triwulan dan Evaluasi terhadap hasil monev
 - c. Merekomendasikan tempat pemeriksaan dipertanggungjawabkan kualitas Air yang dapat
12. Kontribusi Pamsimas Dalam Penurunan KLB Diare di Indonesia, dilakukan dengan langkah Provinsi mendorong wilayah kabupaten supaya daerah-daerah yang rawan KLB Diare dijadikan lokasi Pamsimas.
13. Kontribusi Pamsimas dalam menurunkan angka resiko stunting dengan melakukan:
 - a. Melakukan Workshop terkait Isu Stunting
 - b. Membuat desain media promosi terkait isu stunting

- c. Penguatan dan Pembinaan wirausaha sanitasi untuk penyediaan jasa pembangunan jamban yang terjangkau
 - d. Melakukan pembinaan pada Kabupaten/Kota dalam melaksanakan inspeksi Kesehatan Lingkungan
14. Provinsi memberikan dukungan kebijakan dan melakukan pembinaan Teknis kepada pihak kabupaten dalam rangka percepatan akses universal.
15. Provinsi memetakan keterbatasan kajian teknis (Opsi Terakhir) untuk opsi sumber air yaitu :
- a. Memetakan Tenaga Ahli Sumur Bor dalam untuk Opsi sumur bor apabila ada keterbatasan tenaga ahli sumur bor di kabupaten.
 - b. Memetakan penggunaan Geolistrik apabila kabupaten tidak memiliki alat geolistrik
 - c. Memanfaatkan secara optimal forum CSR dengan cara provinsi mereplikasi pendanaan CSR.
 - d. Melakukan Evaluasi bersama ROMS Provinsi terhadap RKM 100 %
16. Untuk meningkatkan keberfungsian dan keberlanjutan infrastruktur SPAMS di Perdesaan, perlu adanya dukungan pelatihan/Bimtek bagi Asosiasi KPSPAMS kabupaten
17. Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
- a. Melakukan Pembinaan dan Monitoring ke dinas PMD Kabupaten
 - b. Adanya Dukungan Surat Edaran dari Pemerintah/Kementerian
18. Regulasi / kebijakan Anggaran APBDes yang Pro Air Minum
- a. Perlunya Advokasi Regulasi turunan permendes no 19 tahun 2017
 - b. Provinsi membuat peraturan Gubernur tentang Pengawasan terhadap APBDes untuk menghimbau penggunaan APBDes dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa atas Air minum dan Sanitasi
 - c. Mendorong Pemerintah Kabupaten untuk Pro kegiatan AMS dengan mengeluarkan Surat Edaran
 - d. Melakukan pembinaan kepada PMD kabupaten agar memastikan Pemerintahan desa dalam penganggaran Kegiatan Air minum dan Sanitasi di dalam APBDes
19. Penguatan Kelembagaan untuk peningkatan peran dan Fungsi Dinas PMD
- a. Mendorong PMD Kabupaten untuk melakukan kegiatan Pelatihan dengan melibatkan PMD provinsi sebagai narasumber dan stakeholder terkait lainnya
 - b. Perlunya Pendanaan pembinaan terhadap kelembagaan (KP SPMAS)
 - c. Menyampaikan Informasi terkait peraturan atau regulasi terkait pengelolaan dan keberlanjutan SPAMS terbangun
 - d. Pembinaan terhadap Asosiasi SPAMS tingkat Provinsi merupakan tugasnya Dinas PMD Provinsi, sedangkan pembinaan Asosiasi KPSPAMS Kabupaten dan KPSPAMS Desa menjadi tanggung jawab PMD Kabupaten
20. Penguatan keberlanjutan ditingkat masyarakat, penerapan dan pengumpulan iuran pengelolaan keuangan dan transparansi dilakukan melalui:
- a. Monitoring dan edukasi Sosialisasi penyadaran Pengelolaan Keuangan dan tertib administrasi melalui kegiatan Monev ke Desa
 - b. Perlu adanya aturan yang tegas terhadap penerapan iuran dari Desa, misalnya sanksi pemutusan terhadap pengguna yang tidak membayar iuran.